

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fauziah, (2021) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan istilah yang secara umum mengacu pada usaha ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam suatu badan usaha (A. Sidabutar & Kristini Purba, 2022). Dengan begitu pentingnya andil UMKM dalam menunjang perekonomian suatu negara sehingga keberadaan UMKM memiliki harapan yang tinggi dari setiap negara karena mereka berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Salman Al Farisi, 2022). Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai kepada pelaku UMKM (Vinatra et al., 2023).

Dalam membantu meningkatkan kontribusi UMKM pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki program berupa bantuan yang disalurkan kepada kelompok UMKM. Program ini memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa dana bantuan dan peralatan usaha bagi kelompok UMKM dalam meningkatkan standar dan kualitas produksi sehingga pihak UMKM dapat meningkatkan mutu dan kuantitas pada usaha mereka dengan menggunakan dana bantuan yang telah

disediakan. Bantuan ini diberikan kepala kelompok UMKM setelah memenuhi beberapa kriteria sebagai persyaratan dalam penerima bantuan.

Begitu banyaknya pihak atau kelompok UMKM yang mengusulkan diri dalam penerima bantuan UMKM membuat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabutapen Lima Puluh Kota mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemilihan karena masih menggunakan cara manual untuk memilih pelaku atau kelompok UMKM yang pantas mendapatkan bantuan. Kelemahan utama tersebut menjadi alasan terjadinya *human eror* dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan yang diberikan seperti pemberian bantuan tidak akurat atau mengalami salah sasaran karena keterbatasan teknologi.

Teknologi Informasi (TI) telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi bisa meningkatkan suatu efektivitas dan efisiensi kerja terhadap suatu organisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi secara global menciptakan perubahan terhadap cara kerja setiap individu dan organisasi yang dulunya manual hingga menjadi lebih canggih (Hussain Alamyar & Nurmiati, 2022). Teknologi informasi adalah sarana yang digunakan organisasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, meningkatkan pelayanan, membantu dalam pengambilan keputusan serta mendukung kegiatan dalam sebuah organisasi (Haryanto & Eka Indah, 2023).

Peran penting teknologi informasi dalam implementasi sistem pendukung keputusan berdampak pada proses pengambilan keputusan agar memungkinkan hasil yang didapat lebih efektif, transparansi dan efisien. Sehingga dibutuhkan

sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabutapen Lima Puluh Kota dalam proses pemilihan calon penerima bantuan UMKM.

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, dan alat yang diperlukan untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks. Melalui analisis data, pemodelan matematis, dan teknik pengambilan keputusan, SPK membantu pengguna memahami situasi, mengevaluasi berbagai pilihan, dan memilih opsi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Ardiansah, 2024). Sistem pendukung keputusan bisa dimaknai sebagai sebuah sistem yang obyektif yang membantu pihak dalam proses pengambilan keputusan (Satria, 2023).

(Multiobjective Optimization By Ratio Analysis) MOORA adalah sistem multi-tujuan yang mampu mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan (Shabrina & Sinaga, 2021). Menurut R. Rosmawati dalam (Tri susilo et al., 2022) metode MOORA merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. MOORA memberikan fleksibilitas dan kemudahan pemahaman dalam memisahkan subjektif dari proses evaluasi menjadi kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Sedangkan Menurut Y. S. Siregar dalam (Alkhalifi et al., 2024) Metode *(Multiobjective Optimization By Ratio Analysis)* MOORA menampilkan fleksibilitas dan pemahaman dalam menguraikan aspek subjektif dari proses evaluasi menjadi kriteria keputusan yang terbobot, dengan beberapa karakteristik keputusan.

Sebagai panduan dalam merancang sebuah sistem, membutuhkan acuan beberapa jurnal penelitian yang digunakan sebagai referensi. Berikut jurnal terkait yang digunakan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Mukmin, Henny Hamsinar dan Waode Nurwani (2021). Dengan judul penelitian “Penerapan Metode Moora Pada Sistem Penunjang Keputusan Untuk Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)”. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan siswa miskin (BSM) pada SD Negeri 1 Tira telah berhasil dibangun dan mampu melakukan proses seleksi penerima bantuan secara tepat dan objektif, sehingga dapat memberikan rekomendasi siswa penerima BSM.
2. Penelitian yang dilakukan Gehezi Kamlasi, Tiwuk Widiastuti dan Sebastianus Adi Santoso Mola (2024). Dengan judul penelitian “Sistem Pemingkatan Calon Penerima Bantuan Rumah Tinggal Menggunakan Metode *Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis* (MOORA) (Studi Kasus : Desa Mella-TTS NTT)”. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa sistem pemingkatan calon penerima bantuan rumah tinggal dirancang dengan menggunakan metode MOORA. Sistem ini dapat membantu mengurangi potensi keberpihakan atau manipulasi dalam penentuan penerima bantuan. Keobjektifan ini memberikan kepercayaan kepada warga bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kriteria yang jelas dan dapat diukur.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan sistem pendukung keputusan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam menentukan pemilihan calon penerima bantuan UMKM. Maka dari itu penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) merupakan langkah yang tepat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses pemilihan calon penerima bantuan agar hasil yang didapat lebih efisien dan memuaskan. Dari uraian diatas, penulis akan membuat penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN METODE MOORA DALAM PEMILIHAN CALON PENERIMA BANTUAN UMKM PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERBASIS WEBSITE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dibutuhkan perumusan masalah agar penelitian mengarah ke jalan yang baik dan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan berbasis *website* untuk dapat membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memilih calon penerima bantuan UMKM?
2. Bagaimana penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*)

dalam bahasa pemrograman PHP dan *database* MYSQL untuk melakukan pemilihan calon penerima bantuan UMKM?

3. Bagaimana dampak implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) terhadap efisiensi dan efektivitas dalam proses pemilihan calon penerima bantuan UMKM oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Hipotesa Penelitian

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diusulkan dalam rumusan masalah sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan perancangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) yang dibangun dapat membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memilih calon penerima bantuan UMKM secara akurat dan tepat sasaran.
2. Diharapkan sistem pendukung keputusan dengan penerapan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) dalam bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL yang dibangun dapat memberikan hasil keputusan yang tepat dalam memilih calon penerima bantuan UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Diharapkan dengan pengimplementasian sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses pemilihan calon penerima bantuan UMKM.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian diperlukan batasan masalah agar dalam penulisan tugas akhir ini dapat terarah dan masalah yang dihadapi tidak keluar dari masalah yang diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian adalah perancangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) untuk membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proses pemilihan calon penerima bantuan UMKM.
2. Perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan calon penerima bantuan UMKM menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL.
3. Penerapan sistem pendukung keputusan hanya digunakan dalam mengelola data para calon penerima bantuan UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Peneliti ini menggunakan data kriteria dan alternatif didapatkan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang penjelasan mengenai tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian dan dapat diukur menggunakan metode yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Merancang sistem pendukung keputusan berbasis *website* dengan menggunakan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membantu dalam pemilihan calon penerima bantuan UMKM secara efektif dan efisien.
2. Menerapkan sistem pendukung keputusan dengan metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) dalam bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL untuk menentukan calon penerima bantuan UMKM terbaik.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penilaian pemilihan calon penerima bantuan UMKM menggunakan sistem pendukung keputusan. Sehingga keputusan yang dihasilkan lebih akurat, serta menghasilkan keterangan yang tepat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan bernilai bagi penulis dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Peneliti memiliki kemampuan untuk membuat sistem perangkat lunak yang dapat membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memilih calon penerima bantuan UMKM.
- 2) Sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu (S1), sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- 3) Memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam serta pengetahuan yang luas tentang sistem pendukung keputusan dan melatih keterampilan berfikir secara sistematis dan ilmiah.

2. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

- 1) Memudahkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola data terkait pemilihan calon penerima bantuan UMKM.
- 2) Penerapan sistem pendukung keputusan dengan Metode MOORA (*Multiobjective Optimization By Ratio Analysis*) dapat membantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemilihan calon penerima bantuan UMKM secara adil dan tepat sasaran.
- 3) Dapat meningkatkan kepercayaan bagi pelaku atau kelompok UMKM terhadap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota karena pemilihan calon penerima bantuan dilakukan secara objektif dan transparan.

1.7 Gambar Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambaran umum organisasi yang penulis dapatkan dari tempat penelitian berisi paparan penjelasan tentang informasi yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dari sejarah singkat, visi dan misi organisasi, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi.

1.7.1 Sejarah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2017 dan mulai beroperasi awal Januari 2018 dengan nama awal PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, bidang fasilitasi dan sarana kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.

1.7.2 Visi Misi

Visi merupakan gambaran dari tujuan sebuah yang ingin dicapai oleh organisasi dan pandangan ideal tentang masa depan yang diinginkan. Sedangkan misi adalah tujuan utama atas pernyataan mengenai bagaimana suatu organisasi ingin mencapai visinya atau alasan keberadaan organisasi.

Adapun visi dan misi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

1. Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti visi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

2. Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam mewujudkan visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat lima misi yaitu:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
- 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- 3) Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

1.7.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

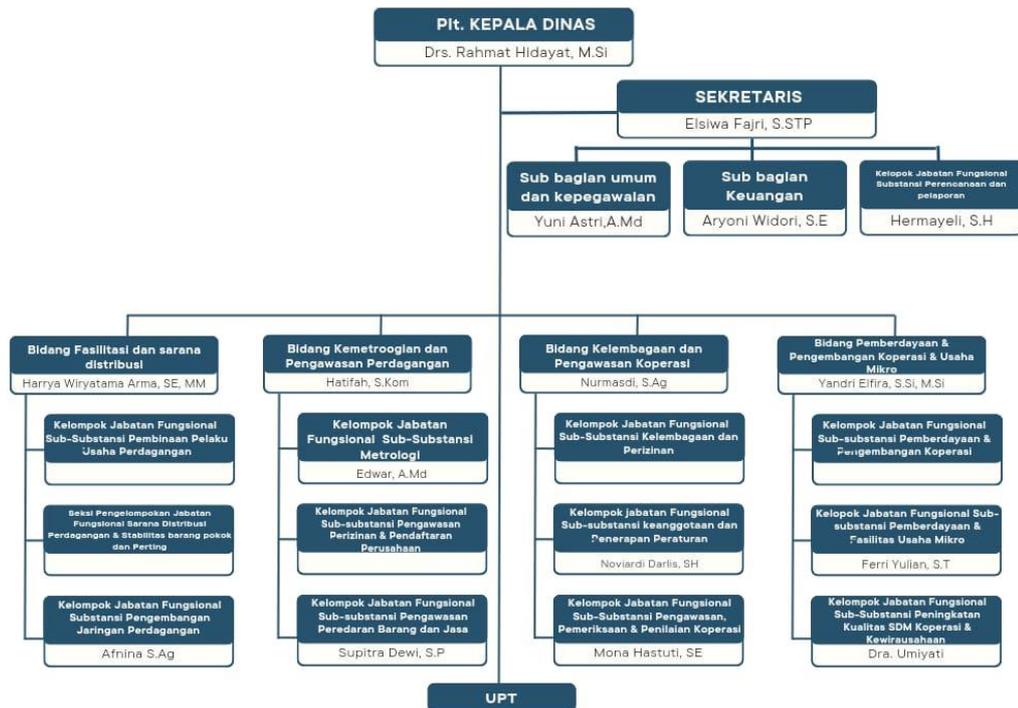
Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Perumusan, kebijakan, penyelenggaraan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Koperasi.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Koperasi.
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan dan kepegawaian dan rumah tangga dinas.
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.7.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lima Puluh Kota

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lima Puluh Kota adalah kerangka atau susunan yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan dalam organisasi. Struktur dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



(Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota